PENGHANCURAN HUTAN KALIMANTAN

Grup APRIL dan APP Tetap Memasok Kayu dari Sumber Kontroversial yang Dimiliki Grup Djarum pada 2018

Oktober 2019

Koalisi Anti Mafia Hutan

PUSAKA

WWF

HaKI Hutan Kita Institute

Jikalahari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

EYES ON THE FOREST

WOODS & WAYSIDE INTERNATIONAL

Environmental Paper Network INDONESIA WORKING GROUP

auriga

Grup APRIL dan APP Tetap Memasok Kayu dari Sumber Kontroversial yang Dimiliki Grup Djarum pada 2018

Laporan lanjutan terhada publikasi Koalisi Anti Mafia Hutan pada Agustus 2018 perihal deforestasi di Kalimantan Timur dalam konsesi Grup Djarum

Setidaknya hingga 2018, Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) dan Asia Pulp & Paper (APP) masih menerima pasokan kayu dari perusahaan yang melanggar komitmen zero-deforestation mereka. Hal ini terlihat dari pelaporan perusahaan ke pemerintah dalam rencana pemenuhan bahan baku industri, yakni adanya pasokan dari PT Fajar Surya Swadaya (FSS).[1]

Melalui analisis citra satelit, Koalisi Anti Mafia Hutan setahun lalu mempublikasi temuan indikasi penghancuran hutan alam oleh FSS untuk membangun hutan tanaman.[2] APP kemudian mengakui adanya pasokan dari FSS dan deforestasi di dalam konsesi FSS.[3] APP juga menyatakan telah menghentikan pembelian dari FSS untuk pabrik pulp-kertas mereka di Sumatera.[4] Namun ternyata pabrik serpih kayu yang terafiliasi dengan APP yang di Kalimantan tidak berbuat serupa.[5] Di sisi lain, APRIL tidak mengakui praktek pembelian dari FSS sebagai pelanggaran terhadap komitmen mereka[6], dan bahkan menggandakan pasokan dari FSS pada tahun 2018.[7]

Deforestasi dalam konsesi Kalimantan Timur

- PT Fajar Surya Swadaya (FSS), sebuah perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Kalimantan Timur, telah menebang habis hutan alam seluas hampir 20.000 ha sejak 2013 (lihat Peta 1), sebagaimana dirilis Koalisi Anti Mafia Hutan pada Agustus 2018.[8]
- Baik FSS dimiliki dan atau dikendalikan oleh Djarum Group[9], salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Djarum Group saat ini juga sedang membangun pabrik pulp di Kalimantan Timur, melalui anak usahanya PT Agra Bareksa Indonesia.[10] Pabrik Agra Bareksa merencanakan memasok kayu dari PT Fajar Surya Swadaya.[11]

Peta 1. Deforestasi pada rentang 2001–2012 dan 2013–2017 dan tutupan hutan alam tersisa dalam konsesi HTI PT Fajar Surya Swadaya di Kalimantan Timur.

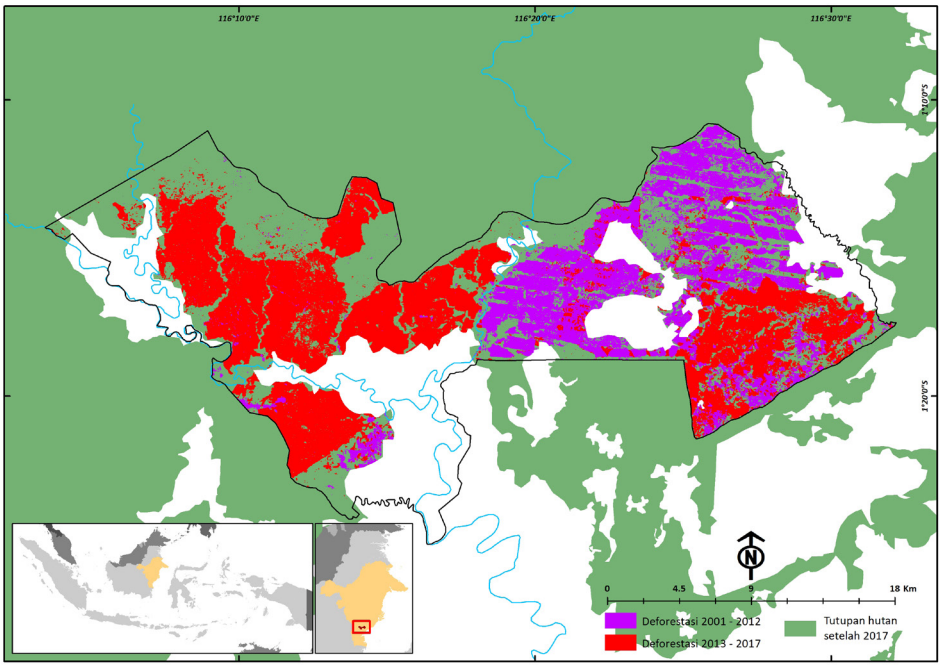

Sumber: Penutupan Lahan 2000 dan 2015. Dapat dilihat pada situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm; Peta kehilangan tutupan tegakan (tree cover loss) oleh Hansen et al. 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change." Science 342 (15 November): 850–53; dengan update hingga tahun 2017, yang tersedia pada: https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/ download_v1.5.html.

Pasokan Kayu Terkait-Deforestasi Ke Industri APRIL dan APP Tahun 2018

APRIL

Berdasarkan laporan pemenuhan bahan baku Industri (RPBBI) yang dikelola Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), pabrik kertas dan pulp utama APRIL di Indonesia yang terletak di Pangkalan Kerinci, Riau, menampung kayu sebanyak 305.617 m^3 dari FSS pada 2018.

APP

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, pabrik kertas dan pulp terbesar milik APP di Indonesia yang terletak di Perawang, Riau, berdasarkan laporan pemenuhan bahan baku industri yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat menampung kayu sebanyak 18.538 m^3 dari FSS pada 2018.[12] Pada tahun yang sama, PT Sarana Bina Semesta Alam (SBSA), pabrik serpih kayu yang terafiliasi dengan APP, menampung kayu sebanyak kayu 25.099 m^3 dari FSS.

Tabel 1. Pulpwood dari Fajar Surya Swadaya, 2017-2018

Tahun	PT Riau Andalan Pulp & Paper (m^3)	PT Indah Kiat Pulp & Paper (m^3)	PT Sarana Bina Semesta Alam (m^3)
2017	141.183	24.863	14.726
2018	305.617	18.538*	25.099

Sumber: Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri. 2017 dan 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

* Pasokan yang diterima Indah Kiat pada 2018 sepertinya adalah pengiriman pada 2017, dan telah dicantumkan APP dalam responnya terhadap laporan terdahulu Koalisi Anti Mafia Hutan mengenai dugaan deforestasi oleh FSS.

Peta 2. Lokasi konsesi FSS dan pabrik APP, APRIL, dan Djarum Group.

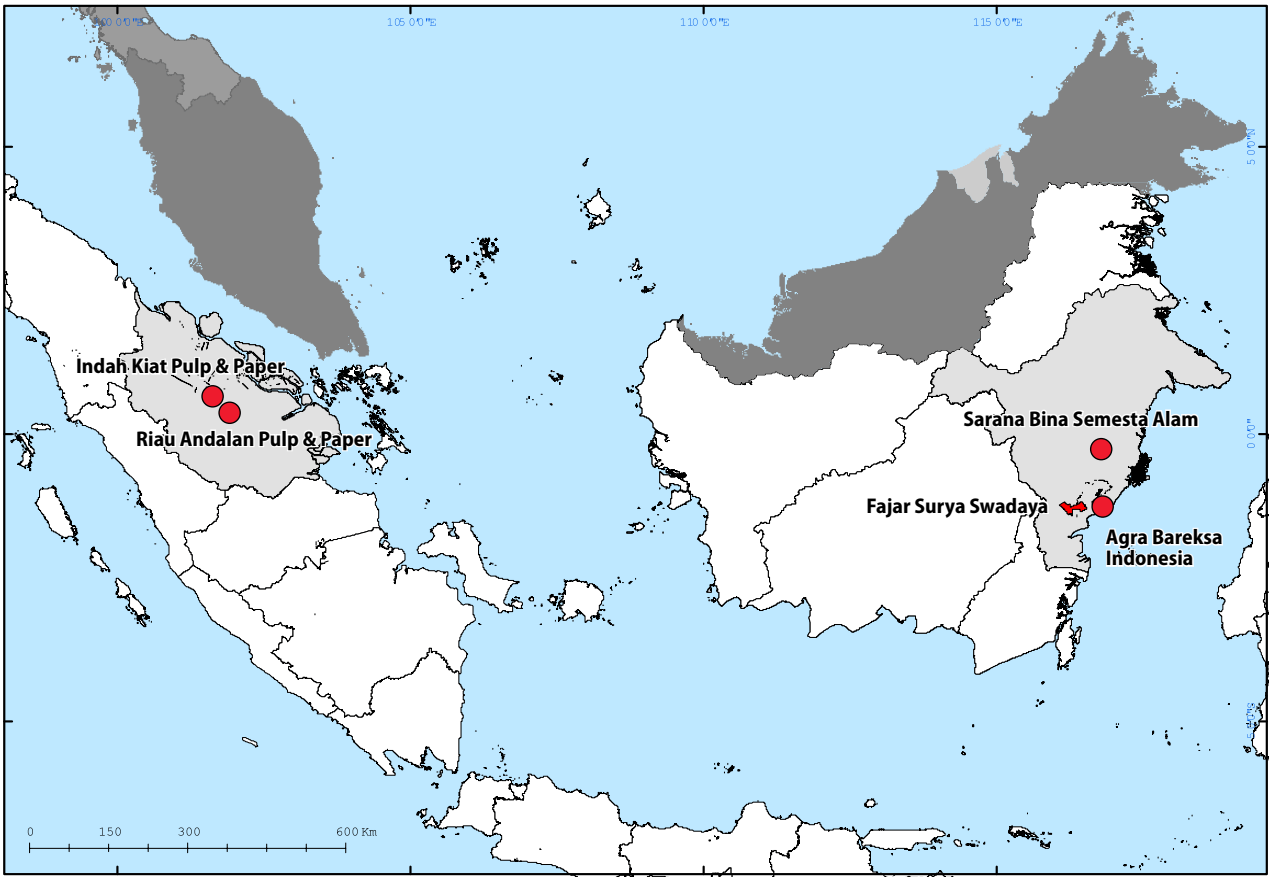

Sumber: Lokasi bersumber dari informasi yang tersedia secara publik

APP Membenarkan Temuan Deforestasi, Dengan Klaim "Kesalahan Administrasi"

APP merespons temuan deforestasi oleh PT Fajar Surya Swadaya dengan merilis "laporan verifikasi"pembelian kayu dari pemasok tersebut.[13] Dalam laporan itu, APP menyatakan bahwa FSS mengonversi hutan dengan Cadangan Karbon Tinggi (HCS), dan pada November 2017 APP mengategorikan FSS sebagai "risiko signifikan yang tidak selaras dengan komitmen APP".[14]

Pengakuan APP terhadap konversi area hutan HCS ini berlawanan dengan klaim APRIL (lihat di bawah). Dalam klaim tersebut, APRIL menegaskan bahwa deforestasi oleh FSS tidak melanggar komitmennya untuk melestarikan area hutan dengan HCS dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV).[15] Baik APP maupun APRIL memiliki komitmen yang melarang pasokan kayu dari sumber yang terhubung dengan penghancuran hutan HCV dan HCS.

APP menggambarkan pembelian kayu dari Fajar Surya Swadaya sebagai akibat dari "kesalahan administrasi"; yang mana kontrak pasokan kayu APP dengan Fajar Surya Swadaya dimulai sebelum proses evaluasi FSS rampung.[16] Dalam laporan verifikasinya, APP mengklaim bahwa kayu sebanyak 27.367 ton dari Fajar Surya Swadaya tidak digunakan dalam proses produksi pulp (lihat Grafik 1). Akan tetapi, APP mengakui penggunaan kayu sebanyak 3.548 ton (sekitar 120 truk) dalam proses produksi sebagai bahan bakar untuk boiler pabrik dan pembuatan palet.[17]

Grafik 1. Tanggapan APP atas laporan Koalisi Anti Mafia Hutan pada Agustus 2018, dengan menyertakan photo ini. Tampak menunjukkan tumpukan kayu dari PT FSS di logyard IKPP.

Sumber: Asia Pulp & Paper. 2018. "APP response to Auriga's allegations of deforestation in East Kalimantan". *News and Media* website. 15 Agustus. https://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/app-response-aurigas-allegations-deforestation-east-kalimantan-0.

Lebih lanjut APP menyatakan, "Kesalahan administrasi serta respons karantina ini telah dibagi dengan mitra pelaksana FCP kami, TFT."[18] Namun, hingga laporan Koalisi Anti Mafia Hutan di rilis pada Agustus 2018, baik APP maupun The Forest Trust (TFT), sekarang bernama Earthworm Foundation, belum merilis secara publik pembelian kayu dari pemasok yang tidak memenuhi kebijakan keberlanjutan APP. APP mengklaim telah menginformasikan pemangku kepentingan soal penangguhan kontrak dengan dua pemasok[19], tapi menyembunyikan fakta telah membeli kayu kotor dari setidaknya satu dari mereka.

Tanpa rilis laporan Koalisi Anti Mafia Hutan, tampaknya tak satupun dari APP maupun TFT/Earthworm berniat untuk merilis laporan terkait pelanggaran kebijakan keberlanjutan ini. Kegagalan untuk melaporkan pelanggaran ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas Forest Conservation Policy APP.

APRIL menyangkal pelanggaran dan pasokan berlipat ganda pada 2018

Berdasarkan dokumen realisasi pasokan bahan baku industri (RPBBI) untuk pabrik pulp-kertas milik APRIL di Sumatera pada 2018, pasokan dari Fajar Surya Swadaya sebanyak 305.617 m^3.[20] Meskipun pasokan ini kurang dari 3% dari total pasokan bahan baku PT Riau Andalan Pulp & Paper, jumlahnya sangat lah besar – sekitar 10.000 muatan truk. Pada 2017, pabrik APRIL memasok kurang dari setengah pasokan tahun 2018 (141.183 m^3).[21]

Dalam respons terhadap laporan Koalisi Anti Mafia Hutan, APRIL menyebut bahwa Tropenbos International telah melakukan penilaian HCV terhadap konsesi FSS yang menyimpulkan bahwa hutan tanamannya dibangun hanya pada area non-HCV.[22] Namun demikian, APRIL tidak melampirkan dokumentasi apapun sebagai pendukung klaim tersebut.

Dalam sebuah dokumen dalam situs APRIL pada Juli 2018 disebutkan bahwa hasil penilaian HCV tersebut "terdapat pada situs pemasok" (baca: PT Fajar Surya Swadaya).[23] Daftar pemasok APRIL per Mei 2019 menyediakan tautan yang memuat fotokopi hitam-putih ringkasan eksekutif penilaian HCV FSS pada 2015 oleh Tropenbos International.[24] Akan tetapi, peta di dalamnya sungguh buram dan tak memperlihatkan warna-warni peta asli sebagai penanda area tertentu sebagai area HCV. Pun, sejauh yang bisa kami telusuri, tampaknya belum ada dokumen penilaian HCV yang disampaikan kepada HCV Resource Network guna proses peer review.[25] Jauh sebelumnya koalisi WWF – RPHK – Gapeta Borneo telah menyampaikan kelemahan mendasar penilaian HCV yang dilakukan terhadap konsesi-konsesi pemasok.[26]

Grafik 2. Peta konsesi PT FSS mencakup ringkasan eksekutif hasil asistensi HCV yang dirilis APRIL dengan pemasoknya pada Mei 2018.

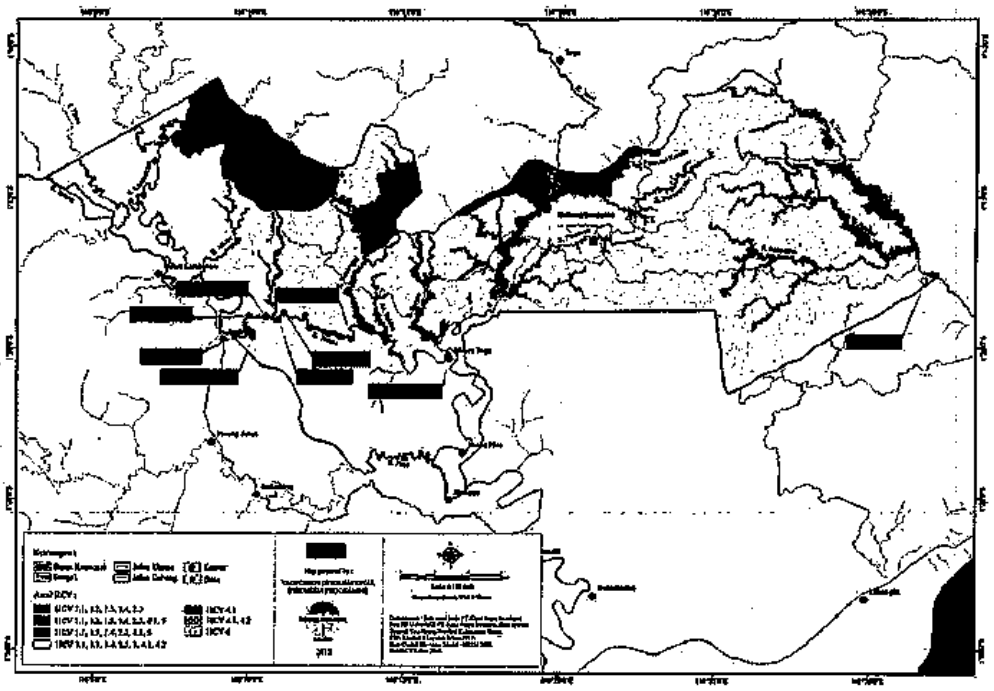

Sumber: Diunduh dari APRIL Group. 2019. "List of HCV assessments – As at 31 May 2019." Sustainability website.

Sejauh ini APRIL tidak menunjukkan secara umum indikasi telah menyelesaikan penilaian High Carbon Stock (HCS) di FSS. Padahal Komitmen Keberlanjutan APRIL secara lugas menyatakan: ". . . APRIL dan para pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, sesuai hasil identifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/ HCV) dan penilaian Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/ HCS)."[27]

Patut ditambahkan, pulp APRIL makin banyak dipakai oleh perusahaan afiliasinya Sateri di China demi pabrik tekstil yang selanjutnya terlapor dibeli oleh penjual pakaian terkemuka seperti H&M dan Zara.[28]

APP Tidak Mengambil Langkah Apapun Perihal Dugaan Pasokan Kayu Deforestasi Ke Pabrik Serpih Kayunya Di Kalimantan Timur

APP mengonfirmasi terjadinya deforestasi di konsesi FSS sehingga menghentikan pasokan dari perusahaan itu ke pabrik pulp-nya yang di Riau. Tetapi, pasokan FSS ke pabriknya yang lain, yakni PT Sarana Bina Semesta Alam (SBSA) di Kalimantan Timur, tetap berlanjut hingga 2018.

Merespon laporan terdahulu Koalisi Anti Mafia Hutan, APP menolak bertanggung jawab perihal pembelian kayu oleh SBSA. "APP bukan pemilik atau pengendali SBSA, yang diduga menerima pasokan kayu dari PT Silva Rimba Lestari (SRL) dan PT Fajar Surya Swadaya (FSS)," demikian salah satu butir responnya. Lebih jauh, pada sebuah media, APP bahkan menyebut mereka tidak memiliki keterhubungan legal atau finansial atau pun pengaruh dengan SBSA.[29]

Akan tetapi, selang enam bulan kemudian APP menyampaikan ringkasan laporan yang salah satu isinya berupa pengakuan bahwa SBSA merupakan "mitra" dimana APP punya "pengaruh signifikan", termasuk kemungkinan keterhubungan kepemilikan dan pengelolaan.[30] Memang, pemegang saham mayoritas dan minoritas SBSA adalah karyawan atau bekas karyawan Sinar Mas Forestry (SMF) dan atau Asia Pulp & Paper (APP), pun komisarisnya, sebagaimana telah diungkap laporan Koalisi Anti Mafia Hutan, sebelumnya (lihat Gambar 1).[31] Tiga perusahaan induk SBSA beralamat di gedung yang sama dengan kantor pusat APP di Jakarta, sebagaimana tercantum pada profil perusahaan pada dokumen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 16 April 2018.[32]

Gambar 1. Jejaring pemegang saham PT Sarana Bina Semesta Alam dan PT Chipdeco Inti Utama, pabrik serpih kayu APP di Kalimantan, dengan data terakhir 16 April 2018.

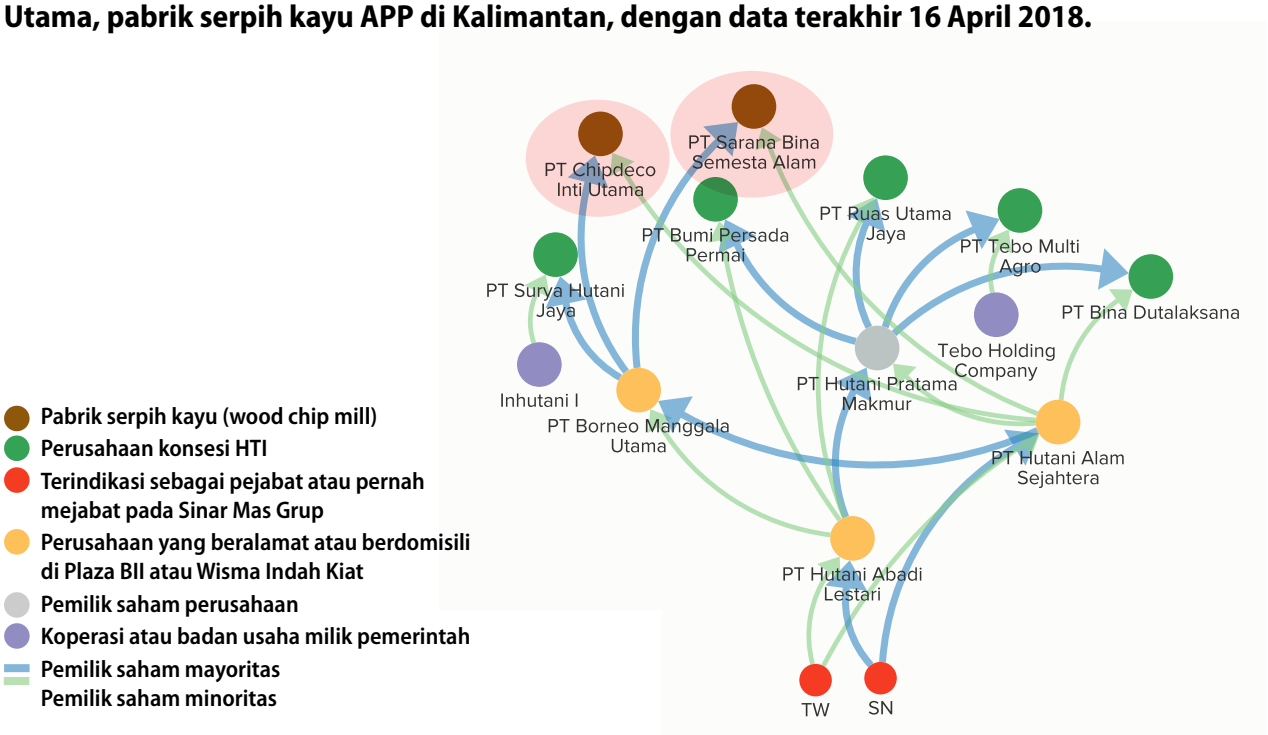

Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan et al. 2018. Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia. 30 Mei. Jakarta, Indonesia. https://auriga.or.id/wpcontent/uploads/2018/05/Tapi-Buka-Dulu-Topengmu.pdf

Data perdagangan 2017 menunjukkan SBSA mengekspor seluruh produknya, senilai US$20 juta atau sekitar Rp 300 miliar, ke Hainan Jinhai Pulp & Paper, pabrik pulp APP di China. Menimbang Komitmen Keberlanjutan APP secara eksplisit mencakup, "APP dan pemasoknya di Indonesia [dan] semua serat kayu Indonesia yang digunakan pabrik APP di manapun",[33] maka penyangkalan APP untuk bertanggung jawab terhadap satu pabrik dalam rantai pasoknya dan dalam kendalinya mencerminkan betapa tidak meyakinkannya komitmen tersebut.

Rekomendasi

Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak Djarum Grup untuk:

1. Segera hentikan semua pembukaan hutan alam di konsesi milik PT Fajar Surya Swadaya dan semua konsesi kehutanan lainnya di bawah manajemen atau kendali grup.
2. Berkomitmen untuk menerapkan kebijakan zero-deforestation dan moratorium pengelolaan lahan yang membuka hutan alam, mengeringkan gambut, dan/atau melanggar hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal.
3. Berkomitmen terbuka untuk memulihkan semua kerusakan lingkungan dan sosial akibat akitivitas PT Fajar Surya Swadaya sejak beroperasi di Kalimantan Timur.

Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak APP dan APRIL untuk:

4. Menghentikan semua pembelian kayu dari PT Fajar Surya Swadaya, hingga Grup Djarum memenuhi rekomendasi di atas.
5. Mempublikasi semua hasil penilaian HCV yang disiapkan untuk PT Fajar Surya Swadaya dan secara resmi mengirimkan ke HCV Resource Network for technical peer review.
6. Mendokumentasikan secara terbuka setiap laporan pelanggaran kebijakan berkelanjutan, dan mempublikasi di situs web masing-masing, dan mengirimkan email kepada seluruh pemangku kepentingan keberlanjutan.
7. Secara penuh menerapkan kebijakan akuntabilitas untuk setiap perjanjian pembelian kayu untuk pulp hanya setelah proses peninjauaan pemasok dinyatakan lengkap.

Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak Djarum, APP, dan APRIL:

8. Berkomitmen untuk mengadopsi mekanisme yang betul-betul independen, transparan, dan akuntabel untuk memantau komitmen perusahaan terhadap nol-deforestasi, pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab, dan tidak melanggar hak komunitas lokal.

Referensi

Koalisi Anti Mafia Hutan et al. 2019. Grup APRIL dan APP Tetap Memasok Kayu dari Sumber Kontroversial yang Dimiliki Grup Djarum pada 2018. Oktober. Jakarta, Indonesia.

Sumber

1 Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri. 2017 dan 2018. "PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.", "PT Sarana Bina Semesta Alam", "PT Riau Andalan Pulp & Paper". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2 WWF et al. 2018. "Beli Kayu Deforestasi Djarum Group di Kalimantan Timur, APP dan APRIL Langgar Komitmen Zero-Deforestation." 15 Agustus. https://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/08/20180815.-APP-APRIL-Langgar-Komitmen-karena-Beli-Kayu-Deforestasi-Djarum-Group.pdf.

3 Asia Pulp & Paper. 2018. "Verification report on logs from PT Fajar Surya Swadaya (FSS)." 5 September. http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?nid=200082.

4 Asia Pulp & Paper. 2018. *Op. cit.*

5 Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri. 2018. "PT Sarana Bina Semesta Alam". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6 APRIL Group. 2018. "UPDATED – APRIL Response to NGO Coalition (Auriga) Report Regarding Supply." 15 Agustus. https://www.aprildialog.com/en/2018/08/15/april-response-to-auriga-report/.

7 Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri. 2017 dan 2018. "PT Riau Andalan Pulp & Paper". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8 WWF et al. 2018. *Op. cit.*

9 Profil perusahaan yang tersedia bagi publik dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10 Situs "BMJ Performance Board", dibuat pada 2014 (https://www.bmjperformanceboard.com) menyatakan, "Sebagai bagian dari pertumbuhan dan diversifikasi, Djarum Group sedang mengembangkan posisinya terkait pengemasan, dengan berinvestasi dalam perkebunan hutan industri, diikuti oleh penggabungan pabrik pulp (215 mt BCTMP) dan pabrik pengemasan (383 mt FBB), di lokasi sekitar kota industri Balikpapan." PT Agra Bareksa Indonesia juga turut diidentifikasi sebagai anak perusahaan Djarum Group dalam situs tersebut. Kalamanthana. 2018. "Kabar Bagus Nih, Agra Bareksa di PPU Bakal Serap 20 Ribu Tenaga Kerja." 19 Februari. http://www.kalamanthana.com/2018/02/19/kabar-bagus-nih-agra-bareksa-di-ppu-bakal-serap-20-ribu-tenaga-kerja.

11 PT Agra Bareksa Indonesia. 2016. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

12 Pasokan yang diterima Indah Kiat pada 2018 sepertinya adalah pengiriman pada 2017, dan telah dicantumkan APP dalam responnya terhadap laporan terdahulu Koalisi Anti Mafia Hutan mengenai dugaan deforestasi oleh FSS.

13 Asia Pulp & Paper. 2018. "Verification report on logs from PT Fajar Surya Swadaya (FSS)." 5 September. http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?nid=200082.

14 Asia Pulp & Paper. 2018. *Op. cit.*

15 APRIL Group. 2018. "UPDATED – APRIL Response to NGO Coalition (Auriga) Report Regarding Supply." 15 Augustus. https://www.aprildialog.com/en/2018/08/15/april-response-to-auriga-report/.

16 Asia Pulp & Paper. 2018. *Op. cit.*

17 Asia Pulp & Paper. 2018. *Op. cit.*

18 Asia Pulp & Paper. 2018. *Op. cit.*

19 Hicks, Robin. 2018. "Have APP and APRIL both broken their no-deforestation promises?" Eco-Business. 17 Augustus. https://www. eco-business.com/news/have-app-and-april-both-broken-their-no-deforestation-promises/.

20 Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri. 2018. "PT Riau Andalan Pulp & Paper". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

21 Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri. 2017 dan 2018. "PT Riau Andalan Pulp & Paper". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

22 APRIL Group. 2018. "UPDATED – APRIL Response to NGO Coalition (Auriga) Report Regarding Supply." 15 Augustus. https://www.aprildialog.com/en/2018/08/15/april-response-to-auriga-report/.

23 APRIL Group. 2018. "Supplier List". Mei. Diunduh dari APRIL Group Sustainability website.

24 APRIL Group. 2019. "List of HCV assessments – As at 31 May 2019." Diunduh dari Sustainability website.

25 HCV Resource Network. 2019. "Find a Report". https://hcvnetwork.org/find-a-report/. Diaskses 28 Juni 2019.

26 WWF et al. 2014. "Natural Forest Clearance Continues on Deep Peat in APRIL Supplier Concession." 20 Mei. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/report_april_hcvf_clearance_continues__english__1.pdf.

27 APRIL Group. 2015. "Kebijakan APRIL Group dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0." 3 June. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/april-sfmp2-3-june-2015-bahasa-ver.pdf.

28 Changing Markets. 2017. "Dirty Fashion: How pollution in the global textiles supply chain is making viscose toxic." June. http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2017/06/CHANGING_MARKETS_DIRTY_FASHION_REPORT_SPREAD_WEB.pdf.

29 Hicks. 2018. *Op. cit.*

30 APP/Sinarmas. 2019. "APP Assessment on its link with industrial forest plantations in Indonesia." Executive Summary. 15 Maret. http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1422.

31 Koalisi Anti Mafia Hutan et al. 2018. *Tapi, Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia*. 30 Mei. Jakarta, Indonesia. https://auriga.or.id/wpcontent/uploads/2018/05/Tapi-Buka-Dulu-Topengmu.pdf.

32 Koalisi Anti Mafia Hutan et al. 2018. *Op. cit.*

33 Asia Pulp & Paper. 2013. *Forest Conservation Policy (FCP)*. Sustainability website.